

**PEMBERDAYAAN DIFABEL MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU  
(POSBINDU): STUDI KASUS POSBINDU DIFABEL KALURAHAN  
SUMBERAGUNG, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Laila Maghfirotul Karimah  
NIM 19102030061**

**Pembimbing:**

**Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.  
NIP. 19640323 199503 2002**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2193/Un.02/DD/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERDAYAAN DIFABEL MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) : STUDI KASUS POSBINDU DIFABEL KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **LAILA MAGHFIROTUL KARIMAH**  
Nomor Induk Mahasiswa : **19102030061**  
Telah ditujikan pada : **Rabu, 13 Desember 2023**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 658b8faabed4



Penguji I  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 658614390454



Penguji II  
Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 658ac276ed29f



Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 658b90c1f3a52

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laila Maghfirotul Karimah  
NIM : 19102030061  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Difabel Melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): Studi Kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Pembimbing,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.  
NIP. 19640323 199503 2 002

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 19830811 201 101 2 010

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Maghfirotul Karimah  
NIM : 19102030061  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemberdayaan Difabel Melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): Studi Kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



Laila Maghfirotul Karimah  
19102030061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang tentu patut untuk diapresiasi atas kekuatannya telah mampu bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih terhadap diri sendiri yang masih terus berusaha untuk kuat dan terus berjuang meski terkadang sangat ingin menyerah. Terima kasih karena sudah mau tetap ada dan terus membersamai setiap langkah, walaupun tidak mudah dan tidak harus cepat pula. Terima kasih karena sudah mau menjadi diri saya sendiri, tanpa peduli dengan segala *comparison* yang datang dari segala pencapaian orang lain. Terima kasih pula karena dengan adanya skripsi ini saya telah memberikan dedikasi sepenuhnya dan terus meningkatkan kepedulian sosial saya dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Diharapkan setelah adanya skripsi ini akan terus tercipta langkah-langkah berikutnya dalam mewujudkan aksi sosial lainnya.
2. Skripsi ini saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat difabel yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan acuan dan semangat bagi kalangan masyarakat difabel untuk terus tumbuh dan menjadi berdaya atas diri mereka sendiri. Skripsi ini telah menjadi salah satu bukti nyata bahwa di luar sana masih banyak masyarakat difabel yang mampu dan cakap untuk menjadi orang-orang yang terpandang derajatnya di Indonesia. Tak hanya itu, skripsi ini juga menjadi salah satu upaya membuka mata seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat difabel,

dan tidak lagi menganggap bahwa masyarakat difabel merupakan masyarakat “kelas dua” yang patut dikucilkan dari kehidupan sosial.

3. Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh orang-orang terkasih yang selama ini tak henti-henti dan tidak pernah bosan untuk memberikan *support* dalam bentuk apapun terhadap diri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan. Baik dari orang tua, adik, keluarga, maupun seluruh kawan dan sanak saudara. Kebaikan kalian tentu tidak akan pernah saya lupakan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.



## MOTTO

“Hidup yang Tidak Dipertaruhkan,  
Bagaimana Ia Bisa Dimenangkan?”.<sup>1</sup>

~ Sutan Sjahrir ~

*“What Doesn’t Kill You Makes You Stronger”.<sup>2</sup>*

~ Friedrich Nietzsche ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, ed. Soedjatmoko (Jakarta: Djambatan, 1990).

<sup>2</sup> Friedrich Nietzsche, *Twilight of The Idols or, How to Philosophize with the Hammer*, ed. Richard Polt, *Twilight of the idols* (Hackett Publishing Company, Inc., 1997), hlm. 15.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Innalhamdalillahi nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.* Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Difabel Melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): Studi Kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata I Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kiranya dengan ini penulis perlu menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu, arahan, serta bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



5. Seluruh *civitas akademika*, baik seluruh dosen beserta staf karyawan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Bapak dr. Agus Tri Widiyantara, MMR., selaku Kepala Dinas Kesehatan Bantul yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Ibu drg. Yuni Astuti, selaku Kepala Puskesmas Jetis I yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Ibu Atik Windarti, SH., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Jetis I yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.
9. Ibu Frisca Galih, A.Md.Farm., selaku Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas Jetis I yang telah memberikan izin serta membantu proses pengambilan data penulis.
10. Ibu Nurul Azizah Al Fitri, AMF., selaku Penanggung Jawab Program *Fisioterapi* Puskesmas Jetis I yang telah memberikan izin serta membantu proses pengambilan data penulis.
11. Bapak Suharto, selaku Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
12. Ibu Margaretha Widiastutik, selaku Koordinator Program Solider-Inklusi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.

13. Bapak Jayadi, SE., selaku kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.
14. Ibu Darini, selaku kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.
15. Ibu Sri Suyati, selaku kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.
16. Bapak Bambang Rohmat, selaku peserta Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung yang telah memberikan izin penelitian serta membantu proses pengambilan data penulis.
17. Bapak Habib Siswanto dan Ibu Binti Maslahah, S.Pd., selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materiil. Kepada adik penulis, Faticha Rahma Salsabila. Juga kepada seluruh kakak sepupu yang selalu bertanya “*kapan wisuda*”. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan berkah pada keluarga ini.
18. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai perjalanan dan proses hidup penulis selama menjalani perkuliahan sebagai anak rantau di Jogja Kota Istimewa ini.
19. Teman-teman *Community Development* angkatan 2019 yang telah banyak memberikan warna hidup selama proses perkuliahan. Semoga hubungan baik tetap terjalin seterusnya.

20. Kepada seluruh teman-teman yang telah banyak berjasa dalam kebersamai proses hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan karya penulis di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Aamiin.



## INTISARI

**Laila Maghfirotul Karimah (19102030061), *Pemberdayaan Difabel Melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): Studi Kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.***

Difabel atau *different ability people* adalah orang yang memiliki keterbatasan pada anggota gerak tubuhnya seperti penglihatan, pendengaran, gerak tangan dan kaki, serta anggota tubuh lainnya yang menjadi rintangan atau hambatan untuk melakukan suatu kegiatan dengan selayaknya. Sampai saat ini, masyarakat difabel masih menjadi “masyarakat kelas dua” atau kelompok yang seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Berbagai stigma dan paradigma negatif, serta belum adanya pemenuhan hak-hak bagi difabel menjadi bentuk ketidak-setaraan dan ketimpangan sosial yang masih melekat di masyarakat. Akibatnya banyak warga masyarakat difabel yang masih mengurung diri dan belum bisa mencapai tingkat kemandiriannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya inovasi dan gerakan sosial untuk melindungi hak-hak difabel, serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat difabel demi mencapai kesejahteraannya. Sebagaimana tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan konsep serta implementasi pemberdayaan difabel melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dengan studi kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk melakukan pengujian validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah konsep dan implementasi pemberdayaan difabel melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dengan studi kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melewati empat tahap yaitu tahap penyadaran masyarakat difabel, tahap pengkapasitasan potensi yang dimiliki (*enabling*), tahap pendayaan (*empowering*), serta tahap memberdayakan berarti melindungi (*protecting*).

**Kata-Kata Kunci: Difabel, Pemberdayaan Difabel, Posbindu Difabel.**

## ABSTRACT

**Laila Maghfirotul Karimah (19102030061), *Empowering Disabled People Through Integrated Development Posts (Posbindu): Case Study of Posbindu Disabled People in Sumberagung Subdistrict, Kapanewon Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.* Thesis, Yogyakarta: Islamic Community Development Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2023.**

Disabled or *different ability people* is a person who has limitations in body movements such as vision, hearing, hand and foot movements, as well as other body parts which become obstacles or barriers to carrying out an activity properly. Until now, people with disabilities are still "second class society" or a group that is often looked down upon by the general public. Various stigmas and negative paradigms, as well as the lack of fulfillment of rights for people with disabilities, are forms of inequality and social inequality that are still inherent in society. As a result, many people with disabilities are still isolating themselves and have not been able to reach their level of independence. Therefore, innovation and social movements are needed to protect the rights of people with disabilities, as well as empower people with disabilities in order to achieve prosperity. The aim of the research carried out is to describe the concept and implementation of empowering people with disabilities through the Integrated Development Post (Posbindu) with a case study of Posbindu for Disabled People in Sumberagung Village, Kapanewon Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.

The research method used is a qualitative descriptive method with a sociological approach. The data collection methods used are the process of observation, interviews and documentation. The data analysis process includes several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To test the validity of the data, the author used triangulation techniques.

The results of the research carried out are the concept and implementation of empowering people with disabilities through the Integrated Development Post (Posbindu) with a case study of Posbindu for Disabled People in Sumberagung Village, Kapanewon Jetis, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, which has gone through four stages, namely the stage of awareness of the disabled community, the stage of potential capacity building (*enabling*), empowerment level (*empowering*), and the empowering stage means protecting (*protecting*).

**Keywords: Disabled, Disabled Empowerment, Disabled Posbindu.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kajian Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2. Pemberdayaan Difabel .....	25
3. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).....	34
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>50</b>

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>128</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Aksi Nasional HAM bagi Pemberdayaan Difabel melalui Pembangunan Inklusif.....	33
Tabel 1. 2 Konsep Posbindu berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan RI. .	38





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam buku *Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*, istilah difabel merupakan kepanjangan dari *different abilities* atau *different ability people* yang berarti perbedaan kemampuan, kata ini juga dianggap sebagai *term* baru yang digagas untuk menggantikan istilah penyandang cacat atau yang biasa kita kenal sebagai *dis-abilities* (Disabilitas).<sup>3</sup> Difabel merupakan orang yang memiliki keterbatasan pada anggota gerak tubuh seperti tangan dan kaki sehingga dapat mengganggu serta memberikan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa difabel adalah seseorang yang keadaan fisik atau biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya.<sup>5</sup>

Penggunaan istilah “difabel” pertama kali digagas oleh Mansur Fakhri dan Setya Adi Purwanta yang merupakan seorang difabel netra dengan tujuan untuk memberikan ide/gagasan baru merujuk pada perubahan konstruksi sosial dalam memahami pemakaian disabilitas atau penyandang cacat. Dengan adanya konsep difabel tentu dapat diakui bahwa setiap individu mempunyai

---

<sup>3</sup> Siti Aminah, Jamil Suprihatiningrum, dan Astri Hanjarwati, “PRODADISA ‘ Program Pemberdayaan Difabel Daksa ’ menuju Percontohan BKD ( Balai Kerja Difabel ) untuk Meningkatkan Kemandirian dan Life Skill Difabel,” *Inklusi 2*, no. 2 (2015): hlm. 304.

<sup>4</sup> A. Salim Chori, *Ortopedagogi Anak Tuna Daksa* (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1995), hlm. 33.

<sup>5</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 4 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

masing-masing perbedaan, dan sebagai konsekuensi dari perbedaan itulah maka sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat untuk memberikan respon positif terhadap berbagai perbedaan yang ada.

Konsep difabel berusaha menghapuskan pelebelan atas tiga faktor “keterbatasan fungsi fisik dan mental, hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial” sebagai tiga hal yang tidak normal. Penggunaan istilah kata “difabel” juga bertujuan untuk memperhalus istilah kecacatan, serta merupakan obyektifitas yang dirasa lebih adil dengan mengedepankan pengakuan atas keberbedaan, bukan ketidakmampuan/kecacatan.<sup>6</sup> Meskipun berbeda secara fisik dan biologisnya, bukan berarti masyarakat difabel memiliki ketidak-mampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat pada tingkatan yang sama dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan difabel.<sup>7</sup>

Sebagaimana Undang-Undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh: (a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (c) perlakuan yang sama untuk

---

<sup>6</sup> M. Joni Yulianto, “Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif,” *Inklusi* 1, no. 1 (2014): hlm. 23.

<sup>7</sup> Iffatus Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017): hlm. 159.

berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (d) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (e) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (f) hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>8</sup>

Pada implementasi di masyarakat, sampai saat ini masyarakat difabel masih menjadi masyarakat kelas dua, yang selalu menjadi korban diskriminasi secara sosio-kultural maupun secara politik.<sup>9</sup> Secara umum, masalah dasar yang masih dialami masyarakat difabel adalah diskriminasi, *prejudice* atau prasangka buruk dengan stigma negatif, pengucilan dan pengingkaran terhadap hak-haknya, dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Stigma sosial dan paradigma negatif yang terbangun di masyarakat mengakibatkan masyarakat difabel dipandang sebelah mata. Masyarakat difabel diperlakukan secara berbeda karena karakteristik kondisi fisik atau karakteristik yang lain. Kecenderungan masyarakat yang membeda-bedakan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai respon dan pandangan yang tidak seharusnya diberikan kepada masyarakat difabel. Sebagian masyarakat masih memberikan stigma negatif dengan menganggap bahwa penyandang difabel akan mengalami kesulitan jika harus bekerja di sektor formal. Seharusnya mereka hanya mampu bekerja sebagai pengemis, pengamen ataupun penjual

---

<sup>8</sup> BPHN, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*, 1997, hlm. 3.

<sup>9</sup> Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Kerangka Hak Azasi Manusia," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): hlm. 148.

<sup>10</sup> Mutasim, "Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat," *Jurnal S-1 Sosiologi* 4, no. 1 (2016): hlm. 11.

koran dikarenakan masih banyak orang yang merasa iba melihat keterbatasan yang dimiliki.<sup>11</sup>

Selain itu, masyarakat difabel menjadi salah satu kelompok masyarakat yang seringkali terabaikan hak-haknya oleh pemerintah. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dan kendala menuju kemandirian masyarakat difabel antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan umum seperti fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang ramah inklusi, pekerjaan, transportasi, bahkan hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Tak hanya itu, masyarakat difabel juga seringkali mengalami hambatan dalam berpartisipasi pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk kaitannya dengan kesehatan, lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat difabel.<sup>12</sup>

Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat difabel untuk mencapai kemandiriannya. Penyediaan akses fasilitas yang aman seperti alat bantu yang dibutuhkan oleh masyarakat difabel seharusnya menjadi tugas pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel dengan pembangunan sistem layanan kesehatan yang inklusif.<sup>13</sup> Kurangnya kesadaran

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>12</sup> Sholehah, "Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach," hlm. 159.

<sup>13</sup> Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, "'No Left Behind' Memandang Hak Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan Kesehatan Inklusif," *Sehat Negeriku*, Diakses pada 24 Desember 2023., last modified 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20231111/3044234/no-left-behind-memandang-hak-penyandang-disabilitas-dengan-layanan-kesehatan-inklusif/>.

akan pentingnya menjaga dan memperhatikan kesehatan diri pada masyarakat difabel, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberian infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi dua hal yang berkesinambungan sebagai hambatan produktivitas masyarakat difabel dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Ragam problema tersebut di atas juga dialami oleh masyarakat difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat difabel di Kalurahan Sumberagung mengalami pelemahan mental akibat adanya stigma negatif serta pengucilan dari warga di sekitarnya. Masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung dipaksa untuk tetap tinggal di dalam rumahnya dikarenakan masyarakat menganggap bahwa mereka tidak mampu bekerja atau melakukan segala sesuatu dengan baik seperti orang normal pada umumnya. Bahkan pengucilan itu juga dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri untuk menutupi rasa malu karena memiliki anggota keluarga yang cacat. Masyarakat difabel di Kalurahan Sumberagung belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak sebagai warga negara baik dalam akses kesehatan yang terjangkau, pendidikan bermutu, pelayanan fasilitas umum yang inklusif, bahkan kemajuan serta kemandiriannya yang diragukan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, masyarakat difabel memerlukan perhatian lebih dan inovasi yang tepat untuk membangun serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki yang tentunya juga tak lepas dari peran berbagai pihak. Dalam hal ini untuk menjawab permasalahan tersebut,

upaya penyediaan layanan yang dapat menjamin kesehatan serta pemberdayaan difabel di Kalurahan Sumberagung mulai dicanangkan, yaitu salah satunya dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Difabel Kalurahan Sumberagung Istimewa yang kemudian disingkat menjadi “Posbinsa Kalisa” yang diprakarsai oleh Puskesmas Jetis I. Dimana dalam kegiatan Posbindu ini masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung diminta keluar rumah untuk melakukan pengecekan kesehatan, serta melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya. Posbindu Kalurahan Sumberagung dimaksudkan sebagai upaya pembebasan terhadap stigma negatif dan pengucilan yang melekat pada diri masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung, serta agar mereka mampu mencapai tingkat kemandirian dalam menjalankan berbagai kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Pemberdayaan Difabel Melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): Studi Kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan setting lokasi di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ditarik rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dalam melakukan pemberdayaan difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dalam pemberdayaan difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan konsep pemberdayaan difabel melalui Posbindu di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Posbindu dalam pemberdayaan difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

## **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pemahaman mengenai pemberdayaan difabel melalui Posbindu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan teori atau kajian di bidang sosial khususnya tentang pemberdayaan difabel melalui Posbindu.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharap mampu memberikan bukti nyata dan tertulis bahwa masyarakat difabel mampu berdaya dan mencapai kemandiriannya melalui konsep pemberdayaan difabel dengan Posbindu. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, serta bagi masyarakat difabel pada khususnya.

### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharap mampu memberikan referensi serta masukan bagi pemerintah untuk memperhatikan serta melindungi hak-hak masyarakat difabel yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi bagi pemerintah mengenai konsep pemberdayaan difabel melalui Posbindu.



c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat serta menjadi salah satu sumber yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

**E. Kajian Pustaka**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan referensi, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “*Peran Posbindu Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*” yang ditulis oleh Shinta Chyntia Agustina pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Posbindu Disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dari dokumen dan literatur yang ada, wawancara dengan pemegang program, serta observasi pelaksanaan Posbindu Disabilitas. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya Posbindu Disabilitas, pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses pelayanan kesehatan dapat terpenuhi meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah atau kendala yang dialami. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Shinta ini terfokus pada pemegang program Posbindu Disabilitas di Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>14</sup>

Kedua, penelitian berjudul “*Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach*” yang ditulis oleh Iffatus Sholehah pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta kepada difabel yang ada di Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD) Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan observasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah DIY telah melakukan pemberdayaan kepada difabel di RTPD dengan menggunakan pendekatan berbasis aset (*Asset Based Approach*) dengan memanfaatkan kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh kalangan difabel di RTPD. Pendekatan *Asset Based Approach* ini dapat membentuk kemandirian difabel serta memaksimalkan kemampuan kreatifitas yang dimiliki meskipun dengan kondisi fisik yang kurang normal. Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan dapat membantu difabel untuk membangun rasa percaya diri dan semangat yang tinggi untuk terus berkarya sehingga nantinya mereka dapat diterima untuk bekerja pada sektor umum seperti masyarakat lainnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian yakni di Rehabilitasi

---

<sup>14</sup> Shinta Chyntia Agustina, “Peran posbindu disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas,” *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 5 (2018).

Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD) yang ada di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pada fokus penelitian, yang mana pemberdayaan difabel yang dilakukan di lokasi tersebut menggunakan pendekatan *Asset Based Approach*.<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Raudhotun Nisak dkk pada tahun 2022 yang berjudul “*Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Melalui Posbindu-PTM di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gemarang Kabupaten Ngawi*”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Posbindu juga dibentuk untuk mengendalikan Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat. Posbindu yang dibentuk di dusun Watukaras, Desa Jenggrik, Kabupaten Ngawi mampu memberikan kegiatan promotif dan preventif, serta memfasilitasi kesehatan warga setempat sehingga mampu menekan angka pertumbuhan PTM di daerah tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara garis besar, bukan hanya kepada kalangan masyarakat difabel saja. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada model atau jenis posbindu yang diteliti, yakni penelitian ini membahas tentang Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach.”

<sup>16</sup> Raudhotun Nisak, Hamidatus Daris Sa’adah, dan Edy Prawoto, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Melalui Posbindu-PTM di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gemarang Kabupaten Ngawi,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 11 (2022).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Satrio Pratama dkk pada tahun 2020 yang berjudul “*Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Daerah Kepulauan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Posbindu PTM yang ada di daerah kepulauan. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis yang ada, yakni dari aspek standar dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, bahkan aspek lingkungan yang masih belum maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian yakni di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, perbedaan penelitian juga terdapat pada model atau jenis Posbindu yang diteliti yakni Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).<sup>17</sup>

#### **F. Kajian Teori**

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan sebuah landasan berfikir yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, maka disusunlah sebuah kerangka teori yang berisi pokok-pokok pikiran sebagai sebuah gambaran permasalahan yang akan dihadapi, serta agar mampu memberikan penjelasan secara teoritis mengenai rumusan masalah yang

---

<sup>17</sup> Satrio Pratama, Henry Setiawan Susanto, dan Y Warella, “Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Daerah Kepulauan,” *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. 2 (2020).

diajukan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kerangka teori menjadi pedoman utama dalam bentuk konseptual yang mendasari seluruh dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dari ketiga rumusan masalah yang ada, peneliti menjelaskan beberapa teori yang berkaitan, yaitu:

## **1. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra yaitu gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Sedangkan menurut Sunyoto Usman yang dikutip oleh Anas Habibi, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dalam bingkai usaha untuk memperkuat hal yang lazim disebut sebagai *community self-reliance* atau kemandirian.<sup>18</sup> Dalam proses pemberdayaan, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif masalah tersebut, serta di perhatikan bagaimana strategi untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Masyarakat juga dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi untuk memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal.<sup>19</sup> Hal ini selaras dengan

---

<sup>18</sup> Anas Habibi Ritonga, "Pengertian, Arah, dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2015): hlm. 11.

<sup>19</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, 1 ed. (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 95.

pemikiran Moh. Ali Aziz dkk yang mana mereka mengungkapkan bahwa “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus dan *partisipatif* dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama”.<sup>20</sup>

Pada dasarnya konsep pemberdayaan menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan disebut sebagai upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya dengan seluruh kemampuan yang ada.<sup>21</sup> Dalam kegiatan pemberdayaan, tentu masyarakat sebagai individu maupun kelompok merupakan tokoh utama yang memiliki peran penting. Tak hanya itu dalam proses pemberdayaan, masyarakat juga memiliki kuasa penuh atas segala keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi hambatan pribadi maupun sosial demi terwujudnya kesejahteraan.

---

<sup>20</sup> Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, ed. Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, dan A Halim, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 136.

<sup>21</sup> Nur Alif Abdul Kholik, “Pemberdayaan Santri dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,” *Etheses IAIN Kediri* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021), hlm. 13.

Pranarka dan Vidhyandika yang dikutip oleh Anas Habibi menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat mempunyai dua kecenderungan. Pertama, pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan kelemahan individu menjadi kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Kedua, pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>22</sup> Ginanjar Kartasmita menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui berbagai sisi, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Tolak ukur dari sisi ini adalah pengenalan bahwa setiap manusia maupun masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Setiap masyarakat pasti memiliki daya. Maka peran dari pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran, serta berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
- 2) *Empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pada aspek ini, terdapat beberapa langkah yang harus

---

<sup>22</sup> Ritonga, "Pengertian, Arah, dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat," hlm. 10.

<sup>23</sup> Ginanjar Kartasmita, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat," *UPI Edu* (Bandung, 1997), hlm. 9.

diwujudkan yaitu menciptakan iklim dan suasana, penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses terhadap berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.

- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Konsep mendasar dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan perlindungan dan pemihakkan terhadap masyarakat yang lebih lemah. Dengan demikian dapat terwujud tujuan akhir proses pemberdayaan masyarakat yakni memandirikan masyarakat, memampukan, serta membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

#### **b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Pada umumnya, prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan sebagai pedoman bertindak, sebagai acuan dalam sebuah proses, serta sebagai target capaian.<sup>24</sup> Menurut Mathew dan Mardikanto “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”.<sup>25</sup> Sebagaimana tercantum dalam buku “Pemberdayaan di Lahan Gambut (2005)”, terdapat 4 prinsip yang

---

<sup>24</sup> Kholik, “Pemberdayaan Santri dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,” hlm. 13.

<sup>25</sup> Mardikanto dan Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, hlm. 101.



digunakan sebagai landasan dasar demi mewujudkan kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>26</sup>

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan baik antara laki-laki maupun perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan diantara berbagai pihak tersebut. Dinamika yang dibangun dalam hubungan kesetaraan adalah dengan mengembangkan serta berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Masing-masing pihak saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadilah proses saling belajar.

2) Prinsip *Partisipatif*

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat *partisipatif*, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat secara langsung. Kemandirian masyarakat akan tumbuh dalam lingkungan yang banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Selanjutnya masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya

---

<sup>26</sup> Sri Najiyati, Agus Asmana, dan I Nyoman Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, ed. Daniati. Susanto, Ditto. (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2005), hlm. 54.

terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya tersebut.

### 3) Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Beberapa hal tersebut dapat menjadi modal dasar bagi proses pemberdayaan masyarakat.

### 4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Namun secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya akan dihapus karena masyarakat sudah mampu untuk mengelola kegiatannya sendiri.

### c. Pendekatan-Pendekatan yang Digunakan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perlu diketahui bahwasannya dalam memberdayakan masyarakat, masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan sebagai subyek dari berbagai upaya pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Ginanjar Kartasmita menyatakan beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>27</sup>

- 1) Upaya pemberdayaan harus terarah (*targetted*) atau yang biasa disebut sebagai pemihakkan. Pemberdayaan ditujukan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan dengan berbagai program yang dirancang agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 2) Program pemberdayaan harus melibatkan secara langsung atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.
- 3) Pemberdayaan harus menggunakan pendekatan kelompok dikarenakan pendekatan ini merupakan pendekatan yang dirasa paling efektif dengan penggunaan sumber daya yang juga lebih efisien.

Tak hanya itu, Sumaryadi juga menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: 1) *The welfare approach*, yaitu membantu

---

<sup>27</sup> Kartasmita, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat," hlm. 9.

memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu yang perlu diberdayakan. 2) *The development approach*, yakni pendekatan yang memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. 3) *The empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak-berdayaannya.<sup>28</sup>

#### **d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”.<sup>29</sup> Dilihat dari operasionalnya, ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan dalam setiap prosesnya, yakni pertama kecenderungan primer yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan kelemahan sebagai suatu kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Dr.I.Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, 1 ed. (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005), hlm. 110.

<sup>29</sup> Prasthiwi Siti Sundari, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 25.

<sup>30</sup> Selvira Resty, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 19.

Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto menjelaskan bahwa proses panjang yang dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat minimal dapat melalui tiga tahapan yaitu:<sup>31</sup>

1) Proses Penayadaran

Dalam proses ini, masyarakat diberi pemahaman sebagai bentuk penayadaran bahwa mereka mampu untuk memiliki “sesuatu”, serta bahwa mereka juga mempunyai kemampuan luar biasa jika mereka mau *meng-eksplora* dan menggali kemampuan yang ada. Program-program yang dapat diberikan dalam tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *believe*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat masyarakat mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri sendiri.

2) Proses Pengkapasitasan

Tahap ini yang sering disebut sebagai *capacity building* atau dalam bahasa lebih sederhana disebut sebagai memampukan atau *enabling*. Proses ini dilakukan untuk memberikan daya atau kuasa kepada masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan harus mampu terlebih dahulu sebelum akhirnya melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian setelah mendapatkan kemampuan tersebut, barulah masyarakat akan dilatih agar mereka mempunyai keterampilan untuk

---

<sup>31</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).

dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Penguatan kemampuan masyarakat dengan berbagai cara dapat menjadikan masyarakat secara bersama saling menopang sehingga dapat maju bersama dan tidak bergantung pada program pemberian dari pihak pemberdaya.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Wuradji yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses penyadaran yang dilakukan secara transformatif, *partisipatif*, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan serta bertujuan untuk menangani berbagai persoalan hidup agar tercapai cita-cita yang diharapkan.<sup>33</sup>

### 3) Proses Pendayaan

Proses ini dilakukan dengan memberikan daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang.<sup>34</sup> Prinsip utama proses pendayaan adalah pemberian daya atau kekuasaan disesuaikan dengan kapasitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang telah melalui proses penyadaran dan proses pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola usahanya.<sup>35</sup> Pada proses ini, masyarakat diberikan peluang berupa pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Pricilia Cherry Rontos, Johnny Hany Posumah, dan Novva N. Plangiten, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 57 (2018): hlm. 5.

<sup>33</sup> Mirza Maulana Al-Kautsari, "Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): hlm. 267.

<sup>34</sup> Resty, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir," hlm. 16.

<sup>35</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, ed. Titik Helmi Khoiriyah (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 33.

*skill* atau kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya masyarakat diberikan peran yang lebih besar secara berskala sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, ditampung aspirasinya, dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* pada pilihan dan hasil pelaksanaan dari pilihan tersebut.<sup>36</sup>

#### e. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui tujuan dan fokus pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang mengidentifikasi bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat berdaya atau tidak.<sup>37</sup> Suhendra mengungkapkan bahwa golongan masyarakat yang dapat dikategorikan berdaya dapat dilihat dari:<sup>38</sup>

- 1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat
- 2) Dapat berjalannya “*bottom-up planning*” atau perumusan program berasal dari aspirasi masyarakat yang memberikan dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri<sup>39</sup>
- 3) Kemampuan dan aktifitas ekonomi

---

<sup>36</sup> Ayu Puspita Sari, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wirausaha dalam Menanggulangi Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly Kota Surabaya,” *Repository Univeristas 17 Agustus 1945 Surabaya* (Universitas 17 Agustus 1945, 2021), hlm. 6.

<sup>37</sup> M. Syukri, “Otonomi dan Pemberdayaan: Refleksi Pendidikan Bagi Pemberdayaan Perempuan,” *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2012): hlm. 6.

<sup>38</sup> Rontos, Posumah, dan Plangiten, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa),” hlm. 2.

<sup>39</sup> Retno Susanti, Djoko Suwandono, dan Mussadun, “Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen,” *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi* 1, no. 2 (2019): hlm. 41.

- 4) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga
- 5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Selain itu, terdapat lima dimensi yang sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yakni terdiri dari aspek kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.<sup>40</sup>

- 1) Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

- 2) Akses

Termasuk dalam aspek ini adalah kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

- 3) Kesadaran Kritis

Suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berdaya apabila mereka telah memiliki kesadaran bahwa kesenjangan yang selama ini ada merupakan bentukan sosial yang dapat dan harus diubah dengan diri mereka sendiri.

---

<sup>40</sup> Ari Cahya Widyanto, "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Malang" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 37.



#### 4) Partisipasi

Keberdayaan pada tahap ini adalah dimana masyarakat ikut terlibat dalam berbagai lembaga yang ada, serta ikut andil dalam proses pengambilan keputusan sehingga kepentingannya tidak terabaikan.

#### 5) Kontrol

Kontrol merupakan suatu tahap dimana seluruh lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Masyarakat juga dapat memenuhi hak-haknya, serta dapat mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

## 2. Pemberdayaan Difabel

### a. Pengertian Difabel

Difabel atau *different ability* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya.<sup>41</sup> Istilah difabel mengandung makna bahwa keterbatasan mungkin saja bisa mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan secara normal, namun masyarakat difabel masih mampu melakukannya dengan cara yang berbeda.<sup>42</sup> Kata atau istilah di Indonesia yang dikaitkan dengan para penyandang cacat lebih banyak mengacu pada kondisi ketidak-mampuan, kelemahan, ketidak-berdayaan, kerusakan, dan

---

<sup>41</sup> Ika Arinia Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi* 2, no. 1 (2015): hlm. 2.

<sup>42</sup> Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *Inklusi: Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): hlm. 149.

makna-makna lain yang berkonotasi negatif.<sup>43</sup> Perubahan kosa kata yang digunakan dari ‘disabilitas’ menjadi ‘difabel’ adalah sebagai salah satu solusi untuk merubah stigma negatif masyarakat serta mencoba melepaskan hubungan kausatif antara keterbatasan fungsi (fisik dan mental), hambatan aktifitas, serta ketidak-beruntungan sosial. Konsep difabel mengakui bahwa setiap individu memiliki perbedaan, terlepas apakah dia golongan difabel atau bukan, dan sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut maka sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan respon dan pandangan positif terhadap sesamanya.<sup>44</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka difabel di Indonesia dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu kesulitan atau masalah dalam 1. Melihat, 2. Berjalan, 3. Konsentrasi/Ingatan, 4. Mendengar, 5. Berkomunikasi, 6. Menggunakan tangan/jari, 7. Mengurus diri sendiri, 8. Gangguan perilaku/emosi.<sup>45</sup>

#### **b. Pengertian Pemberdayaan Difabel**

Pemberdayaan difabel adalah proses di mana difabel diberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan untuk hidup mandiri.<sup>46</sup> Pemberdayaan difabel adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan para difabel melalui berbagai pelaksanaan program pendidikan,

---

<sup>43</sup> Mutasim, “Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat,” hlm. 2.

<sup>44</sup> Fajar, “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Kerangka Hak Azasi Manusia,” hlm. 148.

<sup>45</sup> “Disabilitas Dalam Angka,” *Badan Pusat Statistik DKI Jakarta*, .Diakses pada 22 November 2023., <https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html>.

<sup>46</sup> Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach,” hlm. 157.

pelatihan-pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi, budaya dan lain-lain, agar mereka dapat mencapai tingkat keberfungsian sosial dalam diri mereka, dan memiliki wewenang dalam dirinya untuk mengambil sebuah keputusan pada suatu permasalahan yang berhubungan dengan hidupnya. Pemberdayaan mendorong masyarakat difabel untuk melepaskan diri dari perangkap ketidakberdayaan dan keterbelakangan, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan memiliki kepercayaan diri sepenuhnya untuk hidup mandiri dan sejahtera.<sup>47</sup>

Pemberdayaan difabel dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki oleh difabel sehingga difabel dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam masyarakat, agar mereka tetap *eksis* ditengah-tengah persaingan yang makin kuat.<sup>48</sup> Upaya pemberdayaan difabel dengan memberikan daya atau kekuatan, diharapkan mampu menambah nilai terhadap sumber daya manusia serta nilai tambah sosial dan ekonominya.<sup>49</sup> Sedangkan pendekatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemberdayaan difabel harus diletakkan kepada konteks penghormatan eksistensi difabel dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Agus Imam Wahyudi, "Pemberdayaan Difabel dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan" (UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 33.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>50</sup> Andina Elok Puri Maharani, Isharyanto, dan Rosita Candrakirana, "Pembadanan (Embodying) Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Pemberdayaan Difabel untuk Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): hlm. 90.

### c. Konsep Pemberdayaan Difabel

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masyarakat difabel telah dinaungi oleh negara terkait dengan seluruh aspek kehidupannya. Termasuk didalamnya pemenuhan segala hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, kesejahteraan sosial, serta seluruh hak yang menyangkut tentang kehidupan kemanusiaan. Secara universal, Undang-Undang ini menyangkut tentang pemenuhan kesamaan dan kesempatan, penghormatan, perlindungan, serta penyediaan aksesibilitas dan akomodasi terhadap difabel dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan taraf kehidupan difabel yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi difabel dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>51</sup> Maka dalam rangka mewujudkan segala cita-cita dan harapan bangsa untuk mencapai kesejahteraan tersebut, telah dicanangkan sebuah konsep pembangunan inklusif yang dapat menjadi solusi perbaikan yang nyata.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Maygsi Aldian Suwandi, Widiyanto Dwi Ari Irawan, dan Rhima Rahmawati Fatimah, "Pembangunan Inklusif Kelompok Difabel Melalui Program Pemberdayaan CSR PT PJB UP Muara Tawar," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2022): hlm. 147.

<sup>52</sup> Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): hlm. 10.

Konsep inklusi dipandang sebagai sebuah pendekatan baru yang mampu mengembangkan keterbukaan, dengan mengutamakan pembangunan yang menyeluruh tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada di setiap lapisan masyarakat, seperti perbedaan latar belakang karakteristik, status, etnik, kemampuan, budaya, dan lainnya dalam proses pembangunan.<sup>53</sup> Masyarakat yang inklusif diartikan sebagai sebuah masyarakat yang dapat menerima berbagai bentuk keragaman dan perbedaan serta mengakomodasikannya ke dalam berbagai tatanan infrastruktur yang ada di masyarakat.<sup>54</sup> Definisi menurut *nexcity.org* yang dikutip oleh A. Maftuhin yakni: *“An inclusive city is one of that values all people and their need equally. It is one in which all residents- including the most marginalized of poor workers- have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply”*. Berdasarkan definisi tersebut, kota yang inklusif merupakan kota yang menempatkan warganya sebagai manusia yang berharga, secara politik menghargai hak warganya dengan setara, yang miskin didengar suaranya, melibatkan warganya dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka juga memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan

---

<sup>53</sup> Suwandi, Irawan, dan Fatimah, “Pembangunan Inklusif Kelompok Difabel Melalui Program Pemberdayaan CSR PT PJB UP Muara Tawar,” hlm. 147.

<sup>54</sup> FX. Wahyu Widiatoro et al., “Pemberdayaan Warga Difabel: Kunci Sukses Penggalan Potensi dalam Bidang Bisnis,” *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Aktualisasi Potensi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas* (2013): hlm. 55.

seperti rumah yang layak, air bersih, dan listrik. Terdapat tiga faktor penting untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang inklusif menurut World Bank yang dikutip oleh Arif Maftuhin:<sup>55</sup> Pertama, *Spacial Inclusion* atau inklusi sebagai ruang fisik yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni dengan air bersih dan sanitasi, pendidikan yang ramah difabel, serta fasilitas kesehatan yang mumpuni. Penyediaan infrastruktur layanan umum yang inklusif dapat menjadi gerakan awal untuk memastikan adanya akses terhadap layanan dasar di ruang publik yang setara bagi kelompok yang dimarjinalkan seperti masyarakat difabel. Kedua, *Social Inclusion* atau inklusi sosial yang mana kota/daerah tersebut harus menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang termarjinalkan sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Adanya UU No.8 Tahun 2016 dapat menjadi salah satu akses bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kewenangannya dalam memberantas kemiskinan serta merubah pola pikir masyarakat bahwa difabel bukan lagi kelompok miskin atau sekelompok orang yang menimbulkan problem sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan dan penerimaan sosial yang lebih terbuka, toleran, dan bela rasa untuk memberantas stigma negatif terhadap masyarakat difabel.<sup>56</sup> Ketiga, *Economic*

---

<sup>55</sup> Arif Maftuhin, "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator," *Tataloka* 19, no. 2 (2017): hlm. 96.

<sup>56</sup> Pusat Rehabilitasi YAKKUM, "Inklusi Sosial bagi Difabel: Kilas Balik, Kini, dan Masa Depan," *Pusat Rehabilitasi YAKKUM*, last modified 2021, diakses Maret 30, 2023,

*Inclusion* atau inklusi ekonomi, yakni mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. Akses ke dunia kerja bagi masyarakat difabel terkadang masih saja dipersulit dikarenakan stigma masyarakat yang masih memandang bahwa keterbatasan fisik yang mereka miliki dapat menjadi penghambat dalam dunia pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran di kalangan difabel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan khalayak umum yang dibuktikan dengan data Sakernas Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sejauh ini tingkat ke bekerjaan masyarakat difabel mencapai 16,52 juta orang atau sekitar 8,04% di tingkat nasional yang didominasi dengan sektor kerja informal.<sup>57</sup> Banyaknya masyarakat difabel yang lebih memilih untuk melakukan pekerjaan di sektor informal inilah yang dapat menjadi bukti bahwa hanya sektor informal yang mampu memberikan akses terhadap masyarakat difabel dengan persyaratan yang cenderung mudah, sehingga perlu diadakan akses yang lebih merata terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal bagi masyarakat difabel yang memiliki kecakapan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.

---

<https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/51/inklusi-sosial-bagi-difabel-kilas-balik-kini-dan-masa-depan.html>.

<sup>57</sup> Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan, *Ketenagakerjaan Dalam Data edisi 4 Tahun 2021, Satudata Kemnaker*, vol. 4, 2021, hlm. 196.

#### d. Implementasi Pemberdayaan Difabel

Proses pemberdayaan dilakukan dengan upaya memberikan kapasitas dan kapabilitas sehingga masyarakat difabel dapat keluar dari kerentanan dan tumbuh kemandirian untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Sebagaimana halnya dengan tujuan dari pembangunan inklusif diharapkan agar masyarakat secara keseluruhan tidak lagi memandang difabel dengan segala kekurangan yang mereka miliki, namun juga potensi dan kekuatan yang ada pada diri mereka.<sup>58</sup> Wujud dari pembangunan yang inklusif dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan non-diskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang.<sup>59</sup> Pembangunan inklusif dapat terwujud dengan adanya proses timbal balik dan sebab akibat dari beberapa faktor, antara lain penciptaan akses kesehatan, pendidikan, informasi, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang mengutamakan pemberian fasilitas publik dan mobilitas yang ramah difabel. Tak hanya itu, dukungan lingkungan seperti masyarakat yang ramah difabel serta kebijakan yang mengutamakan hak-hak difabel juga menjadi faktor penting. Kedua hal tersebut menjadi faktor timbal-balik yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat difabel

---

<sup>58</sup> Suwandi, Irawan, dan Fatimah, "Pembangunan Inklusif Kelompok Difabel Melalui Program Pemberdayaan CSR PT PJB UP Muara Tawar," hlm. 149.

<sup>59</sup> Hastuti et al., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas*, ed. Dhania Putri Sarahtika dan Liza Hadiz, 1 ed. (Jakarta: The Semeru Research Institute, 2020), hlm. 3.



sehingga mereka bisa mencapai tingkat kesadaran, partisipasi, serta kemandiriannya secara penuh.<sup>60</sup> Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mewujudkan pembangunan inklusif bagi pemberdayaan difabel dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 sebagai berikut:<sup>61</sup>

**Tabel 1. 1 Rencana Aksi Nasional HAM bagi Pemberdayaan Difabel melalui Pembangunan Inklusif.**

Topik	Aksi
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas</li> <li>b. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND)</li> <li>c. Jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, habilitasi dan rehabilitasi sosial</li> <li>d. Penyandang disabilitas dalam proses peradilan</li> <li>e. Insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas</li> <li>f. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.</li> </ul>
Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintahan</li> <li>b. Peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui <i>jobfair</i></li> <li>c. Peningkatan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut.</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif</li> <li>b. Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus.</li> </ul>

<sup>60</sup> Kathy Al Ju'beh, *Disability Inclusive Development*, ed. Kathy Al Ju'beh et al., *The Routledge Handbook of Global Development* (cbm.org, 2017), hlm. 48.

<sup>61</sup> Kementerian Sekretariat Negara, *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019* (Indonesia, 2018), hlm. 6.

Layanan Kesehatan	Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk: sosialisasi).
Akses Keuangan	Peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif penyandang disabilitas.
Pencatatan Sipil	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Akte Kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan.
Layanan Publik Lainnya	a. Penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas b. Ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil di terminal, pelabuhan, dan bandara.
Akses Informasi	Penayangan Bahasa isyarat dan/atau teks <i>closed captions</i> di TV dan program berita beserta tersedianya peraturan dari Menkominfo terkait hal tersebut.

Sumber: Data Kementerian Sekretariat Negara, 2015.

### 3. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

#### a. Pengertian Posbindu

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko dari sebuah penyakit atau hambatan tertentu yang terintegrasi seperti Penyakit Tidak Menular (PTM), serta gangguan akibat kecelakaan atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Posbindu merupakan bentuk peran aktif masyarakat dalam upaya *promotive* dan *preventif* untuk mendeteksi serta pengendalian dini keberadaan faktor resiko beberapa gangguan tersebut secara terpadu. Kegiatan Posbindu menasar pada

kalangan masyarakat usia produktif 15-59 tahun.<sup>62</sup> Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis dari Posbindu, salah satunya yang sering kita temui adalah Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), Posbindu Lansia, juga Posbindu Remaja.

**Pertama,** Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM). Posbindu PTM dilaksanakan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh Kemenkes RI tentang petunjuk teknis Posbindu PTM. Kegiatan yang dilakukan yakni deteksi dini, pengecekan kesehatan, serta pemantauan faktor resiko terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, stroke, diabetes, dan penyakit sejenis lainnya yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.<sup>63</sup> Posbindu PTM dilaksanakan sebagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) untuk pengendalian faktor resiko terjadinya PTM, dengan pelaksanaannya dibawah pembinaan Puskesmas setempat. Faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang menjadi konsentrasi Posbindu sebagai upaya *preventif* antara lain merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, obesitas, stress, *hipertensi*, *hiperglikemi*, *hiperkolesterol*, serta menindak-lanjuti secara dini faktor resiko yang ditemukan melalui

---

<sup>62</sup> “Ayo Ke Posbindu, Jangan Ragu Jangan Malu Cek Sedari Dini Untuk Masa Tuamu,” *pkm-setabelan.surakarta.go.id*, hlm.1., last modified 2022, diakses Maret 15, 2023, <https://pkm-setabelan.surakarta.go.id/ayoke-posbindu-jangan-ragu-dan-jangan-malu-cek-sedari-dini-untuk-masa-tuamu/#:~:text=Puskesmas Setabelan Kota Surakarta,oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.>

<sup>63</sup> Leonardo Stevano Liesay et al., “Kesenjangan Pemahaman Konsep Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu dengan Pelaksanaannya dari Sudut Pandang Pengambil Kebijakan di Kota Ambon dan Pulau Saparua,” *Molucca Medica - Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran 14* (2021): hlm. 87.

konseling kesehatan dan segera merujuk pada fasilitas pelayanan dasar.<sup>64</sup> Dalam pelaksanaannya, Posbindu PTM telah memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang tepat sasaran yakni seluruh aspek masyarakat ikut terlibat sebagai pemegang program, petugas kesehatan (Puskesmas), dan juga kader (masyarakat yang dilatih untuk menjalankan program Posbindu).

*Kedua*, Posbindu Lansia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kemampuan lanjut usia, upaya pemberdayaan perlu dilakukan demi tercapainya kualitas hidup lansia yang optimal. Posbindu merupakan sebuah program pelayanan terpadu (*Integrated Program*) yang memiliki fokus pendekatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dengan memprioritaskan upaya pemeliharaan (*promotive*), pencegahan (*preventive*), pengobatan (*kuratif*), dan rehabilitasi pada lansia.<sup>65</sup> Posbindu lansia memiliki sasaran lansia (usia 60 tahun keatas), dan pra-lansia (usia 45-59 tahun) untuk mempersiapkan diri menghadapi usia lanjut dengan sehat dan mandiri.<sup>66</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam Posbindu lansia berupa pemeriksaan aktifitas kegiatan sehari-hari, pengecekan tubuh (berat badan, tinggi badan, dan tekanan

---

<sup>64</sup> Yulia Primiyani, Masrul Masrul, dan Hardisman Hardisman, "Analisis Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Kota Solok," *Jurnal Kesehatan Andalas* 8, no. 2 (2019): hlm. 400.

<sup>65</sup> Yunie. Armiyati, Edy. Soesanto, dan Tri. Hartiti, "Optimalisasi Pemberdayaan Kader Posbindu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia di Demak," *Jurnal Keperawatan Komunitas* 2, no. 2 (2014): hlm. 58.

<sup>66</sup> Melita dan Mardiaty Nadjib, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Lansia Ke Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 7, no. 4 (2018): hlm. 159.

darah), pemeriksaan laboratorium (kadar gula darah, asam urat, kolesterol), penyuluhan kesehatan, pemeriksaan status mental dan emosional melalui konsultasi kesehatan, serta upaya rujukan apabila diperlukan.<sup>67</sup>

**Ketiga,** Posbindu Remaja. Kegiatan Posbindu Remaja juga merupakan sebuah upaya pelayanan *promotive* dan *preventive* terhadap remaja mengenai bahaya Penyakit Tidak Menular (PTM) sejak dini. Dimana usia remaja merupakan usia yang dapat memicu terjadinya PTM lebih cepat akibat adanya gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi minuman ber-alkohol, kesulitan tidur, kurang aktifitas fisik, kurang vitamin dari sayur dan buah, dan masih banyak lagi. Posbindu remaja memiliki sasaran remaja berusia 12 tahun sampai 24 tahun dengan tahap pelaksanaan berupa sosialisasi, pemberian pelatihan kader Posbindu remaja, serta melakukan pemeriksaan kesehatan pada remaja.<sup>68</sup>

#### **b. Konsep Posbindu**

Menurut Effendi dan Singarimbun yang dikutip oleh Lilik, konsep merupakan sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai sebuah kejadian atau keadaan, kelompok, maupun individu yang menjadi obyek dalam ilmu sosial. Konsep merupakan gambaran abstrak mengenai sebuah fenomena yang dirumuskan

---

<sup>67</sup> Nila Farid Moeloek, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Indonesia: hukor.kemkes.go.id, 2016), hlm. 25.

<sup>68</sup> Amri Wulandari, Murti Krismiyati, dan Berlina Putrianti, "Usaha Peningkatan Kesehatan Remaja Melalui Pembentukan Posbindu Remaja Di Dusun Candisingo Kelurahan Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada* 2, no. 1 (2020): hlm. 58.

dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu, ide-ide serta penggambaran hal-hal, benda atau gejala sosial lainnya yang dinyatakan dalam bentuk istilah kata.<sup>69</sup>

Dalam hal ini terdapat ketentuan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai konsep pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yaitu:<sup>70</sup>

**Tabel 1. 2 Konsep Posbindu berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan RI.**

<b>A.</b>	<b>Pengertian Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)</b>	
	Posbindu merupakan kegiatan <i>monitoring</i> dan deteksi dini faktor resiko terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terintegrasi seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru <i>obstruktif</i> akut, serta gangguan akibat kecelakaan atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.	
<b>B.</b>	<b>Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penyelenggaraan Kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)</b>	
	Tujuan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)
	Sasaran	Kelompok masyarakat sehat, beresiko, dan penyandang PTM atau orang dewasa yang berumur 25 tahun keatas.  Pada orang dalam kondisi sehat agar tetap terjaga dalam kondisi normal.

<sup>69</sup> Lili Marliyah, "Hakekat Teori dalam Riset Sosial," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2021): hlm. 33.

<sup>70</sup> Kementerian Kesehatan, "Petunjuk Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)" (kemkes.go.id, 2014).

	<p>Pada orang dengan faktor resiko PTM adalah untuk mengembalikan kondisi beresiko menjadi kondisi normal.</p> <p>Pada orang dengan penyandang PTM adalah untuk mengendalikan faktor resiko agar tetap dalam keadaan normal dan mencegah timbulnya komplikasi PTM.</p>
Manfaat	<p>1. Membudayakan Gaya Hidup Sehat dengan berperilaku: <b>C</b>ek kondisi kesehatan secara berkala, <b>E</b>nyahkan asap rokok, <b>R</b>ajin aktifitas fisik, <b>D</b>iet yang sehat dengan kalori seimbang, <b>I</b>stirahat yang cukup, <b>K</b>elola stress. Keenam hal tersebut yang kemudian disingkat menjadi CERDIK dalam lingkungan yang kondusif di rutinitas kehidupan masyarakat.</p> <p>2. Mawas Diri</p> <p>Faktor resiko PTM yang kurang menimbulkan gejala secara bersamaan dapat terdeteksi dan terkendali secara dini.</p> <p>3. Metodologis dan Bermakna Secara Klinis</p> <p>Kegiatan Posbindu dapat dipertanggung-jawabkan secara medis, serta dilaksanakan oleh kader khusus dan bertanggung jawab yang telah mengikuti pelatihan metode deteksi dini atau <i>edukator</i> PTM.</p> <p>4. Mudah Dijangkau</p> <p>Kegiatan Posbindu diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal masyarakat/lingkungan tempat kerja dengan jadwal waktu yang telah disepakati.</p> <p>5. Murah</p> <p>Kegiatan Posbindu dilakukan oleh masyarakat secara kolektif dengan biaya yang disepakati/sesuai dengan kemampuan masyarakat.</p>

Sumber: Kemkes.go.id, 2014. Diakses pada 22 November 2023.

### c. Implementasi Posbindu

Beberapa jenis kegiatan Posbindu:<sup>71</sup>

- 1) Melakukan wawancara untuk menggali informasi faktor resiko keturunan dan perilaku
- 2) Melakukan penimbangan dan mengukur lingkar perut, serta Indeks Massa Tubuh termasuk analisa lemak tubuh
- 3) Melakukan pengukuran tekanan darah
- 4) Melakukan pemeriksaan gula darah
- 5) Melakukan pengukuran kadar lemak dalam darah (kolesterol total dan *trigliserida*)
- 6) Melakukan pemeriksaan fungsi paru sederhana (*peakflowmeter*)
- 7) Pemeriksaan IVA (*Inspeksi Visual Asetat*) oleh tenaga bidan terlatih
- 8) Melaksanakan konseling (diet, merokok, stress, aktifitas fisik lain) dan penyuluhan kelompok termasuk sarasehan
- 9) Melakukan olahraga/aktifitas fisik bersama dan kegiatan lainnya
- 10) Melakukan rujukan ke Puskesmas apabila diperlukan
- 11) Pengaturan jadwal berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan anjuran jangka waktu monitoring yang bermanfaat secara klinis.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 1.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, tepatnya di lokasi binaan Posbindu Difabel yang ada di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Terdapat beberapa faktor yang melatar-belakangi pemilihan lokasi tersebut, yakni dikarenakan adanya program Posbindu Difabel yang diselenggarakan di Kalurahan Sumberagung. Tak hanya itu, terdapat beberapa permasalahan krusial yang dialami oleh masyarakat difabel di Kalurahan Sumberagung sehingga membutuhkan adanya program dari pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1990) yang dikutip oleh Dina Fatma, penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Bogdan dan Taylor (1975) menjelaskan definisi metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>72</sup> Penelitian kualitatif menekankan pada

---

<sup>72</sup> Dina Fatma Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, vol. 2, 2003, hlm. 1.

proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan kejadian yang didengar dan dirasakan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, serta dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Oleh karena itu, peneliti memilih metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara langsung dalam Posbindu Difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul agar dapat menyajikan data secara lengkap.

### **3. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan sumber informasi pencarian data dalam mengungkap masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi, kondisi, dan pengalaman dari latar belakang penelitian. Adapun beberapa subyek dalam penelitian ini yaitu masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung sebagai peserta sekaligus penerima manfaat program Posbindu, kader Posbindu, kepala Puskesmas Jetis I, penanggung jawab program Posbindu Puskesmas Jetis I, penanggung jawab program *Fisioterapi* difabel Puskesmas Jetis I, Koordinator Program Solider-Inklusi SIGAB Indonesia dan beberapa subyek terkait yang dapat membantu memberikan informasi mengenai program Posbindu di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Adapun obyek penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Spredley yang dikutip dalam Ariana digambarkan sebagai situasi sosial yang terdiri

dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (pekerjaan).<sup>73</sup> Obyek dalam penelitian ini adalah konsep dan implementasi pemberdayaan difabel melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dengan studi kasus Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Berdasarkan ketiga komponen tersebut di atas, maka tempat penelitian sebagai obyek yang dimaksud yaitu terletak di Kalurahan Sumberagung. Pelaku penelitian yang dimaksud adalah beberapa subyek penelitian yang ada. Serta aktivitas/pekerjaan sebagai obyek penelitian yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat difabel di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul melalui program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data merupakan sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data adalah informan dan metode penelitian yang digunakan dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan terkait sehingga disebut sebagai data utama. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi

---

<sup>73</sup> Riska Ariana, “Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Android” (Unikom, 2016), hlm. 36.

yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia dan hanya didapat dari tangan kedua. Dalam penelitian ini, data sekunder akan diambil dari dokumen, foto-foto, serta arsip terdahulu yang dimiliki oleh Kalurahan Sumberagung, maupun Puskesmas Jetis I sebagai informan terkait.

#### **5. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menggunakan kriteria terkait berdasarkan pertimbangan khusus dalam pengambilan informasi sebagai sumber data. Kriteria dalam hal ini adalah informan merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan difabel di Posbindu Kalurahan Sumberagung, karakteristik informan harus sesuai dengan tujuan dari penelitian, informan merupakan individu atau kelompok yang akan memenuhi informasi dari rumusan masalah yang ada, serta informan juga harus memiliki ciri-ciri mayoritas dalam obyek penelitian yang ada. Adapun informan yang telah memenuhi kriteria yaitu masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung dalam hal ini berjumlah 5 orang sekaligus kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung, penanggung jawab program Posbindu Puskesmas Jetis I, penanggung jawab program *Fisioterapi* Difabel Puskesmas Jetis I, koordinator program Solider-Inklusi SIGAB,

serta seluruh petugas kesehatan dari Puskesmas Jetis I yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

*Pertama*, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara teliti mengenai obyek penelitian dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan lokasi penelitian. Metode observasi digunakan peneliti untuk melihat situasi latar alami, mengamati benda dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian pada saat berlangsungnya program Posbindu difabel ini dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan observasi secara langsung untuk melihat kondisi di lapangan tempat kegiatan Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung diselenggarakan yaitu di Kantor Kalurahan Sumberagung.

*Kedua*, wawancara. Wawancara adalah temu muka antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami subyek penelitian mengenai topik penelitian yang diangkat.<sup>74</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kejadian atau kegiatan yang ada di lapangan yang tidak dialami secara langsung oleh peneliti. Proses wawancara dilakukan dengan tanya-jawab sesuai dengan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, proses wawancara akan

---

<sup>74</sup> Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, 2: hlm. 6.

dilakukan pada Kader Posbindu Difabel, Penanggung Jawab Program Posbindu dari Puskesmas Jetis I, Penanggung Jawab Program *Fisioterapi* Difabel Puskesmas Jetis I, petugas kesehatan Posbindu, Koordinator Program Solider-Inklusi SIGAB, dan masyarakat difabel yang ada di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

*Ketiga*, dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan atau arsip yang telah tersedia. Dokumentasi dapat diperoleh dari beberapa sumber yakni surat-surat resmi, *notulensi* rapat, proposal, laporan kegiatan, buku terkait, dll.

## 7. Validitas Data

Dalam kegiatan penelitian, data yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa data tersebut adalah data yang kredibel (terpercaya). Metode yang digunakan untuk menguji validitas data dari penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah sebuah metode pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk pengecekan atau juga sebagai pembanding terhadap data yang sedang diuji keabsahannya.<sup>75</sup> Triangulasi untuk menguji kredibilitas suatu data juga dapat diartikan sebagai pengecekan terhadap berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang digunakan. Dalam

---

<sup>75</sup> Husnii Tamrin, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menjadi Barista Kopi (Studi Pelatihan Barista Inklusif oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 22.

metode triangulasi, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian. Triangulasi dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, triangulasi teori, dan triangulasi waktu.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan data dan informasi yang diperoleh dari satu sumber terhadap sumber lainnya.<sup>77</sup> Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada Penanggung Jawab Program *Fisioterapi* Difabel dengan hasil wawancara pada Penanggung Jawab Program Posbindu dari Puskesmas Jetis I. Selain itu, peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada Kader Posbindu dengan masyarakat difabel yang ada di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Tak hanya itu, peneliti juga

---

<sup>76</sup> Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): hlm. 55.

<sup>77</sup> Gokhan, "Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 29.

<sup>78</sup> Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," hlm. 56.

membandingkan hasil yang diperoleh dari arsip data Puskesmas Jetis I dengan arsip data yang dimiliki oleh Kader Posbindu.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan teknik cek dan recek.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara kepada beberapa informan terkait, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## 8. Analisis Data

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis interaktif. Analisis interaktif ini memungkinkan proses analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan. Teknik analisis interaktif memiliki beberapa tahapan, yaitu:<sup>80</sup>

a. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>79</sup> Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif."

<sup>80</sup> Tamrin, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menjadi Barista Kopi (Studi Pelatihan Barista Inklusif oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta)," hlm. 23.



Hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi catatan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, memilah dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa agar dapat mengambil sebuah kesimpulan akhir.<sup>81</sup> Dalam tahapan ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian diseleksi kembali agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Data yang sudah sesuai akan diklasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian data yang memiliki informasi secara luas dan mendalam.

c. Penyajian Data

Setelah menemukan bagian-bagian penting dari hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data tersebut, dan memutuskan penjelasan data apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penyajian data dilakukan apabila informasi penelitian telah tersusun secara sistematis, sehingga dapat memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penyajian data secara teks naratif yang berbentuk catatan lapangan.

---

<sup>81</sup> Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, 2: hlm. 10.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara jelas, sistematis, logis, dan sesuai metode yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama peneliti berada di lapangan. Setelah data terkumpul dengan cukup, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara, kemudian setelah data telah benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir dengan memahami kembali hasil penelitian.

### H. Sistematika Pembahasan

**BAB I** membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** membahas mengenai gambaran umum. Gambaran umum Kapanewon Jetis, gambaran umum Kalurahan Sumberagung seperti profil desa; kondisi demografi; potensi yang dimiliki; serta gambaran umum mengenai Puskesmas Jetis I selaku penanggung jawab program Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung.

**BAB III** membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta pembahasan. Dalam bab ini, peneliti membahas mengenai konsep Posbindu dalam melakukan pemberdayaan difabel di Kalurahan Sumberagung, implementasi Posbindu bagi masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung, serta analisis berdasarkan teori-teori yang digunakan.

**BAB IV** berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran, dan penutup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan yang telah didapat setelah melakukan berbagai proses penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil temuan yang didapat oleh peneliti di lapangan, serta dengan mengkaji hasil temuan tersebut menggunakan analisis dari beberapa teori yang digunakan, maka pokok permasalahan yang tersusun dalam rumusan masalah dapat diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut:

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan sebuah program pelayanan kesehatan di tingkat desa yang menitik-beratkan programnya pada pencegahan dan deteksi dini faktor resiko terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM). Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya program Posbindu yang diprakarsai oleh Puskesmas Jetis I juga berupaya mewujudkan keberpihakannya pada perspektif GEDSI (*Gender Equality Disability Social Inclusion*). Sejalan dengan adanya perspektif tersebut, maka Puskesmas Jetis I menciptakan sebuah inovasi program pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat difabel dalam satu program yaitu Posbindu Difabel.

Upaya Puskesmas Jetis I dalam memberikan kegiatan pemberdayaan dan pelayanan publik yang ramah inklusi telah terwujud dalam realisasi program Posbindu Difabel. Dengan mengusung konsep pembangunan yang

inklusif, serta merealisasikan rangkaian kegiatan yang ada menggunakan langkah yang sistematis dapat mencerminkan tahapan upaya pemberdayaan masyarakat difabel dari yang sebelumnya dianggap sebagai “kelompok rentan” menjadi kelompok masyarakat yang mandiri dan memiliki nilai di masyarakat. Dengan mengusung konsep program yaitu pelayanan 5 meja dan kegiatan pemberdayaan melalui edukasi yang bermanfaat, program Posbindu berhasil meningkatkan kesadaran akan kesehatan diri pada masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung.

Dalam implementasinya, tahapan pemberdayaan difabel melalui program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Dwijowijoto dan Ginandjar Kartasasmita yang mana tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap Penyadaran, yang mana telah diimplementasikan oleh Puskesmas Jetis I dalam upaya membangkitkan motivasi dan kesadaran masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung untuk terus maju dan mengembangkan diri melalui teknik *gathering*, *door to door*, dan melakukan perizinan melalui institusi pemerintahan terkait seperti kalurahan.
2. Tahap Pengkapasitasan/*Enabling*, tahapan ini diwujudkan dalam kegiatan pemberian pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Posbindu sebelum dilaksanakannya program pemberdayaan melalui Posbindu.
3. Tahap Pendayaan/*Empowering*, tahap ini merupakan tahap inti yaitu terwujud dalam proses implementasi program pemberdayaan masyarakat difabel melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Difabel di Kalurahan

Sumberagung. Tahapan pemberdayaan ini diwujudkan dengan berjalannya program Posbindu yang mengusung konsep 5 Meja serta 1 program pemberdayaan atau edukasi lainnya. Dalam tahap ini, masyarakat difabel juga diberikan kekuasaan sepenuhnya atas berjalannya program Posbindu dengan para kader yang mandiri.

4. Tahap Memberdayakan Berarti Melindungi/*Protecting*, tahapan ini diimplementasikan dengan adanya jalinan kerjasama antara Puskesmas Jetis I dengan lembaga SIGAB. Tahapan ini juga terwujud pada hasil yang didapat dari adanya program Posbindu, yaitu pemberian nilai di mata masyarakat sebagai wujud *eksistensi* masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung. Selain itu, kelompok masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung juga lebih di dengar suaranya serta berhasil mendapatkan hak-haknya dalam hukum dan pemerintahan.

Dengan adanya seluruh tahapan ini dapat mengangkat nilai dari masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung, serta berhasil mewujudkan kesetaraan sebagaimana konsep yang diusung oleh Puskesmas Jetis I yaitu mengangkat perspektif GEDSI (*Gender Equality Disability Social Inclusion*).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat adanya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan program Posbindu menjadi lebih baik kedepannya. Dalam hal ini, maka peneliti perlu menyampaikan beberapa rekomendasi saran yang membangun sebagai berikut:

1. Posbindu Difabel merupakan sebuah program pemberdayaan yang mampu menciptakan masyarakat difabel Kalurahan Sumberagung menjadi lebih mandiri dan dinilai di mata publik. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan bagi penyelenggara program Posbindu (dalam hal ini Puskesmas Jetis I). Beberapa kendala tersebut antara lain adalah macetnya pelaksanaan program Posbindu mulai dari bulan April hingga Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena tidak adanya alasan yang jelas dari peserta maupun kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung. Berdasarkan hal tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan menciptakan pola manajemen program yang lebih baik kedepannya. Sehingga dapat menjaga konsistensi dari seluruh anggota Posbindu baik peserta maupun kadernya agar tetap melaksanakan kegiatan Posbindu secara rutin setiap bulannya di tengah seluruh kesibukan yang ada.
2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak Puskesmas Jetis I dengan para kader Posbindu Difabel Kalurahan Sumberagung sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan yang tidak jelas, dan program Posbindu dapat berjalan lancar. Perlu diketahui bahwa pola komunikasi yang baik dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat, dikarenakan seluruh peserta maupun *stakeholder* yang terlibat dapat secara aktif mengemukakan pendapatnya masing-masing.
3. Perlu diadakannya kegiatan evaluasi program Posbindu Difabel yang melibatkan seluruh pihak pelaku program Posbindu. Melalui proses

evaluasi, kemudian akan diperoleh hasil analisis dan pengamatan seluruh pelaku kegiatan mengenai apa saja hambatan, kendala, dan tantangan yang ada selama program berlangsung. Selain itu dalam proses evaluasi program, seluruh pelaku kegiatan dapat merumuskan solusi perbaikan yang berguna bagi kelancaran dan kesuksesan program Posbindu Difabel kedepannya.

4. Perlu diadakannya pendataan atau administrasi yang baik dalam pelaksanaan program Posbindu, sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan program Posbindu Difabel kedepan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. "Profil Lembaga SIGAB." <https://sigab.org/profil-lembaga/>.
- Administrator. "Sejarah Desa Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul." *Bantulkab.go.id*.
- Adriyani, Dina Fatma. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*. Vol. 2, 2003.
- Agustina, Shinta Chyntia. "Peran posbindu disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 5 (2018).
- Al-Kautsari, Mirza Maulana. "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 267.
- Aminah, Siti, Jamil Suprihatiningrum, dan Astri Hanjarwati. "PRODADISA ' Program Pemberdayaan Difabel Daksa ' menuju Percontohan BKD ( Balai Kerja Difabel ) untuk Meningkatkan Kemandirian dan Life Skill Difabel." *Inklusi* 2, no. 2 (2015).
- Ariana, Riska. "Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Android." Unikom, 2016.
- Armiyati, Yunie., Edy. Soesanto, dan Tri. Hartiti. "Optimalisasi Pemberdayaan Kader Posbindu Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia di Demak." *Jurnal Keperawatan Komunitas* 2, no. 2 (2014): 57–63.
- Aziz, Moh. Ali. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Diedit oleh Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, dan A Halim. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010).
- Bantul, JDIH Kabupaten. *Peraturan Bupati Bantul*. Bantul, 2020.
- Bantul, Pemerintah Kabupaten. "Profil Kapanewon Jetis." Last modified 2021. Diakses November 16, 2023. <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/>.
- BPHN. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*, 1997.
- Chori, A. Salim. *Ortopedagogi Anak Tuna Daksa*. Bandung: Departemen

- Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1995.
- Fajar. "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Kerangka Hak Azasi Manusia." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019).
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 10.
- Febrianti. "Implementasi Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu Ptm) Di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya." *Publika* 5, no. 5 (2017).
- Febriyanti dkk, Riska. *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*. Diedit oleh Firman Nugraha. Lekkas, 2020.
- Gokhan. "Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas*. Diedit oleh Dhanita Putri Sarahtika dan Liza Hadiz. 1 ed. Jakarta: The Semeru Research Institute, 2020.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. 1 ed. Bandung: Humaniora, 2011.
- Indriyany, Ika Arinia. "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta." *Inklusi* 2, no. 1 (2015).
- Jetis I, Pengurus Puskesmas. *Profil Puskesmas Jetis I Kab. Bantul 2023*, 2023.
- Jetis, Pemerintah Kapanewon. *Laporan Kinerja (LKJ) Kapanewon Jetis Tahun 2021*, 2021.
- Ju'beh, Kathy Al. *Disability Inclusive Development*. Diedit oleh Kathy Al Ju'beh, Benjamin Dard, Mary Keogh, Elizabeth Lockwood, dan Yana Zayed. *The Routledge Handbook of Global Development*. cbm.org, 2017.
- Kartasasmita, Ginanjar. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat." *UPI Edu*. Bandung, 1997.
- Kesehatan, Kementrian. "Petunjuk Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)." kemkes.go.id, 2014.

- Kesehatan RI, Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementrian. “‘No Left Behind’ Memandang Hak Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan Kesehatan Inklusif.” *Sehat Negeriku*. Last modified 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20231111/3044234/no-left-behind-memandang-hak-penyandang-disabilitas-dengan-layanan-kesehatan-inklusif/>.
- Ketenagakerjaan, Bidang Pengelolaan Data. *Ketenagakerjaan Dalam Data edisi 4 Tahun 2021. Satudata Kemnaker*. Vol. 4, 2021.
- Kholik, Nur Alif Abdul. “Pemberdayaan Santri dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.” *Etheses IAIN Kediri*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021.
- Liesay, Leonardo Stevano, Christiana Rialine Titaley, Bertha Jean Que, Aldo Evan Wijaya, Maxwell Landri, Vers Malakauseya, Putri Ulandari, et al. “Kesenjangan Pemahaman Konsep Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu dengan Pelaksanaannya dari Sudut Pandang Pengambil Kebijakan di Kota Ambon dan Pulau Saparua.” *Molucca Medica - Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran* 14 (2021): 87.
- Maftuhin, Arif. “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator.” *Tataloka* 19, no. 2 (2017): 96.
- Maftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat , Difabel, dan Penyandang Disabilitas.” *Inklusi: Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016).
- Maharani, Andina Elok Puri, Isharyanto, dan Rosita Candrakirana. “Pembadanan (Embodying) Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Pemberdayaan Difabel untuk Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 90.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 4 ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marliyah, Lili. “Hakekat Teori dalam Riset Sosial.” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2021).
- Melita, dan Mardiaty Nadjib. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Lansia Ke Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017.” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 7, no. 4 (2018): 159.
- Moeloek, Nila Farid. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25*

*Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia: hukor.kemkes.go.id, 2016.*

Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Diedit oleh Titik Helmi Khoiriyah. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Mutasim. "Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat." *Jurnal S-1 Sosiologi* 4, no. 1 (2016).

Najiyati, Sri, Agus Asmana, dan I Nyoman Suryadiputra. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Diedit oleh Daniati. Susanto, Ditto. Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2005.

Nations, United. *Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. United Nations: Department of Economic and Social Affairs, Social Inclusion*, 2016.

Negara, Kementerian Sekretariat. *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*. Indonesia, 2018.

Nietzsche, Friedrich. *Twilight of The Idols or, How to Philosophize with the Hammer*. Diedit oleh Richrad Polt. *Twilight of the idols*. Hackett Publishing Company, Inc., 1997.

Nisak, Raudhotun, Hamidatus Daris Sa'adah, dan Edy Prawoto. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Melalui Posbindu-PTM di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gemarang Kabupaten Ngawi." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 11 (2022).

Pratama, Satrio, Henry Setiawan Susanto, dan Y Warella. "Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Daerah Kepulauan." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. 2 (2020).

Primiyani, Yulia, Masrul Masrul, dan Hardisman Hardisman. "Analisis Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Kota Solok." *Jurnal Kesehatan Andalas* 8, no. 2 (2019): 399.

Resty, Selvira. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

RI, Kemenkes. *Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular*

- (Posbindu PTM). Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, 2012.
- Ritonga, Anas Habibi. "Pengertian, Arah, dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2015): 10.
- Rontos, Pricilia Cherry, Johnny Hany Posumah, dan Novva N. Plangiten. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 57 (2018): 2.
- Sari, Ayu Puspita. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wirausaha dalam Menanggulangi Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly Kota Surabaya." *Repository Univeristas 17 Agustus 1945 Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945, 2021.
- Sasue, Gilbert Ardian. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD," 2023.
- Sholehah, Iffatus. "Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017).
- Sjahrir, Sutan. *Renungan dan Perjuangan*. Diedit oleh Soedjatmoko. Jakarta: Djambatan, 1990.
- Statistik, Badan Pusat. *Kecamatan Jetis Dalam Angka 2022*. Bantul, 2022.
- Sumaryadi, Dr.I.Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. 1 ed. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.
- Sumberagung, Pengurus Wilayah. *Buku Monografi Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2017*, 2017.
- Sundari, Prasthiwi Siti. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Susanti, Retno, Djoko Suwandono, dan Mussadun. "Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen." *Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi* 1, no. 2 (2019): 41.
- Suwandi, Maygsi Aldian, Widiyanto Dwi Ari Irawan, dan Rhima Rahmawati

- Fatimah. "Pembangunan Inklusif Kelompok Difabel Melalui Program Pemberdayaan CSR PT PJB UP Muara Tawar." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2022).
- Syukri, M. "Otonomi dan Pemberdayaan : Refleksi Pendidikan Bagi Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2012): 6.
- Tamrin, Husnii. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menjadi Barista Kopi (Studi Pelatihan Barista Inklusif oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Unicef, dan Partners Putting Children. *Creating Impact Together : How Private Sector Partnerships are Shaping the Future. Unicef for Every Child*, 2023.
- Wahyudi, Agus Imam. "Pemberdayaan Difabel dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan." UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Widiantoro, FX. Wahyu, Wartono, Arundati Shinta, dan Hartosujono. "Pemberdayaan Warga Difabel: Kunci Sukses Penggalan Potensi dalam Bidang Bisnis." *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Aktualisasi Potensi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas* (2013): 55.
- Widyanto, Ari Cahya. "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Malang." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Wrihatnolo, Randy R., dan Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Wulandari, Amri, Murti Krismiyati, dan Berlina Putrianti. "Usaha Peningkatan Kesehatan Remaja Melalui Pembentukan Posbindu Remaja Di Dusun Candisingo Kelurahan Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada* 2, no. 1 (2020): 58.
- YAKKUM, Pusat Rehabilitasi. "Inklusi Sosial bagi Difabel: Kilas Balik, Kini, dan Masa Depan." *Pusat Rehabilitasi YAKKUM*. Last modified 2021. Diakses Maret 30, 2023. <https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/51/inklusi-sosial-bagi-difabel-kilas-balik-kini-dan-masa-depan.html>.
- Yulianto, M. Joni. "Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif." *Inklusi* 1, no. 1 (2014).
- "Ayo Ke Posbindu, Jangan Ragu Jangan Malu Cek Sedari Dini Untuk Masa Tuamu." *pkm-setabelan.surakarta.go.id*. Last modified 2022. Diakses Maret 15, 2023. <https://pkm-setabelan.surakarta.go.id/ayokeposbindujanganragudanjanganmalucek-sedari-dini-untuk-masa->

